

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

Naz'aina

Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

ABSTRACT

Regional fiscal desentralisation is an opportunity for regions to manage and control local community interests based on the community's aspiration. In addition, local government possesses wider authority to run owned resources efficiently. The research's objective is to find out how development expenditure affects regional economic growth and revenue and how to regional economic growth affects regional revenue. The research used time series data from 2000 – 2010. Data is processed and analysed used Path Analysis. Result of the research shows that Kabupaten Aceh Utara regional development expenditure has positive and significant aspects toward regional revenue of Kabupaten Aceh Utara by standardized beta development expenditure s 0,60 and significant at 0,028. Meanwhile, partially regional development expenditure of Kabupaten Aceh Utara has positive and significant effect toward regional revenue of Kabupaten Aceh Utara. For economic growth variable partially has negative and significant effect toward regional revenue. In order to maximize economic growth in Kabupaten Aceh Utara, government is expected to revive old industries such as PT. Arun, Exxon Mobil, PT. AAF, PT. PIM and PT. KKA.

Keywords: Fiscal desentralisation, economic growth, regional revenue

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Pemerintah daerah perlu melakukan pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta masyarakat daerah harus memperkirakan potensi sumber penerimaan yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah yang lebih tepat sasaran, maka pemerintah pusat telah menetapkan otonomi daerah sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan potensi dan kemampuan daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing.

Pengelolaan pemerintahan daerah, baik ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbarui dengan landasan yuridis yang mengatur tentang otonomi daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan dan acuan dalam menjalankan otonomi daerah.

Pemerintah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat harus mempunyai suatu perencanaan (*planning*) yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Menurut Zweig dalam Jhingan (2002) perencanaan ekonomi mencakup perluasan fungsi penguasa negara sampai ke pengorganisasian dan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang yang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas negara yang kemudian disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan dan belanja daerah merupakan dua hal yang saling berketergantungan, dimana Pemerintah Daerah dapat melakukan perencanaan yang tepat sasaran serta melakukan pengembangan pembangunan daerah berawal dari adanya pendapatan (penerimaan daerah) sebelum melakukan pengeluaran keuangan daerah (belanja daerah). Dalam hal pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah (Mangkoesoebroto, 2001).

Kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dilakukan mengakibatkan munculnya kesiapan daerah yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal yang rendah (Halim, 2001). Rendahnya kapasitas ini mengindasikan tingkat kemandirian daerah rendah.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin pada PAD (Mardiasmo, 2002). Pergeseran komposisi belanja juga digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan suatu pendekatan ekonometris untuk melihat bagaimana dampak belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dampak pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KAJIAN PUSTAKA

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan Produk Nasional Bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan berkembang atau tumbuh bila terjadi pertumbuhan output riil. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi kepada penduduknya, Simon Kuznets (Jinghan, 2000:57). Menurut Sukirno (2006:8), pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.

Menurut Tambunan (2008:21) mengartikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun, yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Sedangkan menurut Budiono (1981 :1), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Dalam melihat pertumbuhan ekonomi perlu diperhatikan aspek output total, jumlah penduduk dan waktu jangka panjang.

Bastian (2001:23) mengatakan penerimaan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berbasis hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumberdaya alam.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Widjaja (2001:42) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian keberhasilan penggunaan dana tersebut ditentukan oleh pemerintah daerah.

Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber keuangannya, maka dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 telah dicantumkan sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri atas; Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah yang selanjutnya akan menambah belanja daerah yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja berikut, baik untuk belanja apatur daerah maupun pelayanan publik, Halim (2007 : 73). Yang termasuk belanja modal adalah belanja modal tanah, jalan dan jembatan, bangunan air (irigasi), jaringan, instalasi, bangunan gedung, monumen, alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, alat-alat kantor dan rumah tangga , alat-alat studio dan alat-alat komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, belanja modal hewan / ternak serta tanaman dan belanja modal alat-alat persenjataan / keamanan.

Berbagai belanja yang dialokasi pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk kepentingan jangka pendek, pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dari pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini berhubungan langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar bila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan (Mardiasmo, 2002 : 30). Pergeseran komposisi belanja ini, juga digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. Lin dan Liu (2000 : 1) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional (Madjidi, 1997: 3).

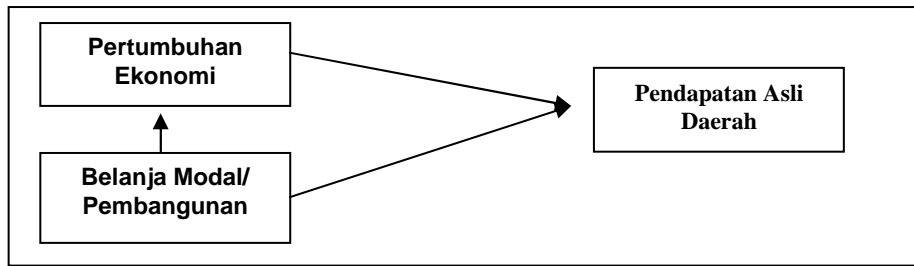
Kerangka Pemikiran

Belanja modal / pembangunan merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah yang selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gambar 2.1 akan menggambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

Hipotesis

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka pemikiran, dapat dihipotesiskan bahwa ; Belanja Modal / Pembangunan berhubungan positif terhadap Pendapatan

Asli Daerah (H_1), dan Belanja Modal / Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi berhubungan positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (H_2).



Gambar 1
Kerangka Pemikiran Penelitian

METODE PENELITIAN

Sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten Aceh Utara. Sampel ini dipilih karena memiliki sumberdaya alam yang banyak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder APBD realisasi pemerintah Kabupaten Aceh Utara tahun 2000-2010.

Analisis ini menggunakan alat-alat analisis deskriptif seperti rata-rata, nilai minimum, maksimum, standar deviasi. Analisis ini ditujukan untuk memberikan gambaran alokasi belanja pembangunan maupun tingkat penerimaan PAD. Adapun pertumbuhan ekonomi (dalam konteks daerah) maupun pendapatan per kapita dihitung dengan formulasi berikut ini (Kuncoro 2004) :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1} \times 100\%}$$

Keterangan :

PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

PDRB_{t-1} = Produk Domestik Regional Bruto satu tahun sebelum tahun t

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Jalur (*Path Analysis*). Path Analysis memungkinkan pengujian pengaruh simultan sebuah variabel terhadap variabel lain. Pengujian asumsi klasik diperlukan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Adapun uji asumsi yang digunakan adalah normalitas, autokorelasi dan multikolinearitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto

a. Kontribusi Sektoral dan Struktur Ekonomi

Kapasitas struktur ekonomi suatu daerah atau wilayah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menunjukkan besaran nilai tambah secara ekonomi yang dihasilkan penduduk di suatu daerah pada suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Kapasitas suatu lapangan usaha (sektor) di dalam perekonomian juga dapat dicerminkan dari besaran kontribusi sektor tersebut di dalam PDRB. Nilai tambah riil yang dihasilkan di dalam perekonomian digambarkan oleh PDRB atas dasar harga konstan, sementara nilai tambah nominalnya ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga berlaku. Untuk yang terakhir ini belum

mengeliminir faktor kenaikan harga-harga secara umum di dalamnya (inflasi). PDRB kabupaten Aceh Utara dapat ditelaah melalui dua faktor penting, yaitu (i) memasukkan komponen minyak dan gas bumi (migas); dan (ii) tanpa memasukkan minyak dan gas bumi (non migas). Kendati demikian, kemampuan lapangan usaha perekonomian daerah yang benar-benar berbasis usaha masyarakat adalah yang tanpa memasukkan minyak dan gas bumi (non migas). Dengan memasukkan minyak dan gas bumi, terlihat PDRB Kabupaten Aceh Utara atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2006 mencapai Rp. 15,272 triliun. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2000 yang naik berjumlah Rp. 13,700 triliun. Namun, demikian, secara rata-rata nilai tambah ADHB hanya meningkat 1,56 persen per tahun selama periode 2000-2006.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat dari sisi lapangan usaha berdasarkan minyak dan gas bumi (migas) dan tanpa migas. Masing-masing lapangan usaha tersebut berpengaruh terhadap capaian pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Aceh Utara berdasarkan lapangan usaha migas terlihat mengalami penurunan yang sangat signifikan selama tahun 2003-2006, yaitu rata-rata -7,60 persen per tahun. Penurunan pertumbuhan yang relatif mencolok terjadi pada tahun 2004 dan tahun 2005, yakni masing-masing sebesar -12,73 persen dan -32,92 persen. pada tahun 2006, angka pertumbuhan ekonomi kembali positif, walaupun juga masih relatif rendah (hanya 1,12 persen) Menurunnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh berkurangnya kontribusi nilai tambah dari beberapa industri besar di daerah ini yang sebelumnya sangat dominan peranannya, baik yang beroperasi dalam lapangan usaha pertambangan, seperti PT Arun dan Exxon Mobil, maupun industri pupuk (PT. AAF dan PT. PIM), dan industri kertas (PT. KKA). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi daerah dengan tanpa memasukkan migas (non migas) juga relatif rendah. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi daerah ini selama 2003-2006 hanya 0,70 persen per tahun (di bawah 1,0 persen). Bahkan, pada tahun 2005 ekonomi daerah ini tanpa migas tumbuh negatif (-7,97 persen). Adapun gambaran pertumbuhan ekonomi Aceh Utara selama empat tahun terakhir ini disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara
Selama Tahun 2003-2006

No	T a h u n	Pertumbuhan (%)	
		Migas	Non Migas
1	2003	9,23	1,64
2	2004	-12,73	3,40
3	2005	-32,92	-7,97
4	2006	1,12	3,23
Pertumbuhan Rata-rata (%)		-7,60	0,70

Sumber: BPS dan Bappeda Aceh Utara (diolah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, Bab V pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari : (a) Pajak Daerah; (b)Retribusi Daerah; (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan

(d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d), meliputi : (a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) Jasa giro; (c) Pendapatan bunga; (d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang-barang dan/atau jasa oleh daerah. Selanjutnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 180 ayat (1) menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pasal 179 ayat (2) huruf (a) terdiri atas : (a) Pajak daerah; (b) Retribusi daerah; (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/kota; (d) Zakat; dan (e) Lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah. Terlihat bahwa dalam UU No. 11 Tahun 2006, zakat telah dimasukkan sebagai salah satu sumber penerimaan PAD. Hingga tahun 2005, perkembangan PAD Kabupaten Aceh Utara tidak mengalami kenaikan yang berarti. Pada tahun 2005, penerimaan PAD kabupaten ini bahkan turun menjadi Rp. 29.626.570.000,- atau berkurang sebesar Rp. 101.622.000,- (turun 0,34 persen) dari tahun 2004. Penurunan ini dipengaruhi oleh dampak dari bencana besar gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh, termasuk di Kabupaten Aceh Utara. Setahun kemudian (tahun 2006), khususnya setelah ditandatanganinya MoU antara Pemerintah RI dan GAM pada Agustus 2005, PAD Aceh Utara mengalami kenaikan yang sangat signifikan. PAD Aceh Utara pada tahun 2006 meningkat mencapai 138,21 persen dibanding tahun 2005, atau menjadi Rp. 70.573.792.100,- Dengan demikian, peningkatan PAD selama tahun 2003-2006 tumbuh rata-rata 29,84 persen per tahun. Kenaikan yang terbesar terjadi pada jenis penerimaan dari hasil perusahaan milik daerah (naik rata-rata 59,91 persen per tahun), retribusi daerah (naik rata-rata 46,52 persen), dan lain-lain PAD yang sah (naik rata-rata 30,13 persen), sementara jenis penerimaan pajak daerah tumbuh rata-rata 9,11 persen per tahun selama tahun 2003-2006. Kendati demikian, secara nominal penerimaan PAD yang terbesar di Kabupaten Aceh Utara berasal dari pos lain-lain PAD yang sah, yaitu mencapai Rp. 58.234.920.000,- (tahun 2006). Secara rinci tentang jumlah PAD Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2003-2006 adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Perkembangan Realisasi PAD Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2003-2006 (dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun				(%)
		2003	2004	2005	2006	
1	Pajak Daerah	3.153.100.000	2.276.250.000	2.968.944.000	4.468.246.100	9,11
2	Retribusi Daerah	561.216.000	711.092.000	881.681.000	2.586.339.000	46,52
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	808.226.000	1.152.250.000	1.365.986.000	5.284.287.000	59,91
4	Lain-lain PAD yang Sah	20.310.985.000	25.588.600.000	24.409.959.000	58.234.920.000	30,13
Jumlah		24.833.527.000	29.728.192.000	29.626.570.000	70.573.792.100	29,84

Sumber : Perhitungan APBD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2003-2006

Belanja Pembangunan

Belanja daerah dapat diartikan sebagai semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, belanja daerah perlu dirancang dengan cermat agar berbagai kegiatan yang membutuhkan dana pembangunan tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan yang tidak bermanfaat dan merugikan masyarakat dan pemerintah. Komponen-komponen belanja daerah Kabupaten Aceh Utara dapat dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung terdiri atas : 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja bunga; 3) Belanja subsidi; 4) Belanja hibah; 5) Belanja bantuan sosial; 6) Belanja bagi hasil; 7) Belanja bantuan keuangan; 8) Belanja tidak terduga. b. Belanja langsung terdiri atas : 1) Belanja pegawai; 2) Belanja barang dan jasa; 3) Belanja modal; Adapun belanja daerah pemerintah daerah kabupaten Aceh Utara dan tingkat pertumbuhannya dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

No	Tahun	Belanja Rutin	Belanja Pembangunan	Total Belanja	Pertumbuhan (%)
1	2003	187.797.158.616	477.292.245.792	665.092.404.408	-0,23
2	2004	196.571.665.419	537.058.068.839	733.629.734.258	0,10
3	2005	166.630.826.553	524.072.405.932	690.703.232.485	-0,06
4	2006	220.221.443.701	678.643.825.566	898.865.259.257	0,30

Sumber : Salinan dari DPKAD Kabupaten Aceh Utara

Pada tabel di atas, terlihat bahwa tingkat pertumbuhan dari belanja pemerintah kabupaten Aceh Utara pada tahun 2003 dan 2005 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena belanja pemerintah daerah kabupaten Aceh Utara di digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit. Sehingga realisasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Aceh Utara sedikit. Namun pada tahun 2004 dan 2006 pertumbuhan total belanja pemerintah daerah meningkat hal ini disebabkan penerimaan-penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara lebih luas, pembiayaan dapat diartikan sebagai seluruh transaksi transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembahasan

HIPOTESIS 1

Hasil output memberikan standardized beta belanja pembangunan selama 10 thun sebesar 0,60 dan signifikan pada 0,028 yang berarti bahwa belanja pembangunan daerah kabupaten Aceh Utara mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 4
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.269E9	2.098E10	-.346	.737
	BELANJA	.060	.023	.658	.028

a. Dependent Variable: PAD

HIPOTESIS 2

Tabel 5
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.300	8.852	-.486	.640
	BELANJA MODAL	1.043	.324	.751	.012
	PERTUMBUHAN EKONOMI	-.311	1.232	-.059	.807

a. Dependent Variable: Y

Hasil output memberikan unstandardized beta belanja pembangunan selama 10 tahun sebesar 1,043 dan signifikan pada 0,012 yang berarti bahwa belanja pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara secara parsial mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan untuk variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial mempunyai dampak negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dengan unstandardized betanya adalah -0,311 dan pada tingkat signifikan 0,807. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kontribusi nilai tambah dari beberapa industri besar di daerah ini yang sebelumnya sangat dominan peranannya, baik yang beroperasi dalam lapangan usaha pertambangan, seperti PT Arun dan Exxon Mobil, maupun industri pupuk (PT. AAF dan PT. PIM), dan industri kertas (PT. KKA). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi daerah dengan tanpa memasukkan migas (non migas) juga relatif rendah. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi daerah ini selama 2003-2006 hanya 0,70 persen per tahun (di bawah 1,0 persen). Bahkan, pada tahun 2005 ekonomi daerah ini tanpa migas tumbuh negatif (-7,97 persen). Namun secara simultan, kedua variabel ini (belanja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi) mempunyai pengaruh yang signifikan. Belanja pembangunan tidak hanya ditujukan untuk pengembangan infrastruktur industri, tapi juga ditujukan untuk berbagai infrastruktur jasa yang langsung terkait dengan pemberian layanan kepada publik. Upaya peningkatan PAD melalui retribusi ataupun pajak harus diimbangi dengan kesungguhan pemda untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Secara nominal penerimaan PAD yang terbesar di daerah Kabupaten Aceh Utara berasal dari pos lain-lain PAD yang sah, yaitu mencapai Rp. 58.234.920.000,- (tahun 2006). PAD Kabupaten Aceh Utara mengalami kenaikan yang sangat signifikan setelah ditandatanganinya MoU antara Pemerintah RI dan GAM pada Agustus 2005 dan pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Belanja pembangunan daerah kabupaten Aceh Utara mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Aceh Utara dengan standardized beta belanja pembangunan sebesar 0,60 dan signifikan pada 0,028.
2. Secara simultan, baik belanja pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan secara parsial, belanja pembangunan daerah secara parsial mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara. Pertumbuhan ekonomi secara parsial mempunyai dampak negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dengan unstandardized betanya adalah -0,311 dan pada tingkat signifikan 0,807. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kontribusi nilai tambah dari beberapa industri besar di daerah ini yang sebelumnya sangat dominan peranannya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi daerah dengan tanpa memasukkan migas (non migas) juga relatif rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta, Erlangga
- Halim, Abdul. 2001. Analisis Diskriptif Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. *KOMPAK STIE YO*. Yogyakarta.
- Jhingan, M.L. 2002. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajagrafindo persada, Jakarta.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Desentralization and Economic Growth in China. *Development and Cultural Change*. Chicago. Vol 49.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*. BPFE Yogyakarta, Yogyakarta
- Sukirno, Sadono. 2006. *Teori Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi ke-3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tambunan, Tulus. 2008. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Ghalia. Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2001. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. Rajagrafindo persada, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 .1962. tentang Perusahaan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 .1997. tentang Pajak Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18. 1999. tentang Jenis Pajak Daerah